PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Senin Tanggal: 05 Agustus 2019 Halaman: 9

6.488 PESERTA PBI JKN DINONAKTIFKAN

Berlaku Agustus, Verifikasi Dipercepat

YOGYA (KR) - Kementerian Sosial menonaktifkan data 6.488 penduduk Kota Yogya yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iur (PBI) untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan tersebut berlaku per Agustus atau bulan ini sehingga Dinas Sosial Kota Yogya kini harus mempercepat proses verifikasi.

Verifikasi perlu dilakukan secepatnya untuk menyisir warga Kota Yogya yang status kepesertaannya aktif. "Kami sudah koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) terkait data tersebut. Ini untuk memastikan apakah masih tercatat sebagai penduduk kota atau sudah pindah," jelas Kepala Dinas Sosial Kota Yogya Agus Sudrajat, Minggu (4/8).

Hasil dari koordinasi dengan Dindukcapil, menurut Agus, hanya ada 2.825 peserta yang statusnya aktif sebagai warga Kota Yogya. Sedangkan sisanya, diketahui sudah pindah kependudukan, meninggal dunia serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya kosong.

Data 2.825 peserta yang aktif tersebut kemudian ditelusuri kembali. Terutama untuk mengetahui apakah sudah memiliki jaminan kesehatan dari program lain atau justru masih perlu dibantu agar kembali masuk PBI. Sedangkan dari penelusuran tersebut, separuhnya diketahui sudah memiliki jaminan kesehatan, baik karena ditanggung oleh perusahaan tempatnya bekerja maupun mendaftar mandiri. "Saat ini kami fokus untuk memetakan seribu orang yang belum memiliki jaminan sama sekali tersebut," imbuh Agus.

Penduduk Kota Yogya yang kepesertaannya dicoret dari PBI, itu selanjutnya akan diusulkan masuk dalam program Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah (PDPD). Sehingga yang bersangkutan dapat menikmati program JKN namun iurannya dibayarkan oleh Pemkot Yogya. "Kami harus secepatnya melakukan verifikasi agar mereka tetap bisa menikmati layanan kesehatan," tandasnya. **(Dhi)-o**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005